

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang Masalah

Pembentukan Daerah Boalemo di Gorontalo seringkali dikaitkan dengan dua hal, yakni bagian dari daerah kerajaan masa lampau dan pembagian daerah menurut aturan kolonial Belanda. Berdasarkan data historis, Boalemo pada abad 17 pernah menjadi sebuah daerah kerajaan, wilayahnya mencakup bagian Barat Gorontalo. Ketika Belanda berkuasa sistem pemerintahan beberapa kali mengalami perubahan.

Pada tahun 1946, ketika Sulawesi menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur, keswaprajaan yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 perihal pembentukan Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia. Dalam Undang – undang ini Boalemo menjadi salah satu kawedan dalam wilayah Kabupaten Gorontalo. Status kawedan Boalemo berlaku sampai dengan keluarnya Undang – undang Nomor 5 tahun 1974 yang selanjutnya disusul oleh Permendagri Nomor 132 tahun 1978 tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja kantor pembantu Bupati/Walikota.

Pada tahun 2001 beberapa Kecamatan di Kabupaten Boalemo dimekarkan sehingga jumlah kecamatan yang semula hanya 5 Kecamatan, telah menjadi 10 Kecamatan, yakni ketambahan 5 Kecamatan baru hasil pemekaran, yaitu : Dulupi (pemekaran Tilamuta), Lemito (pemekaran Popayato), Mananggu (pemekaran Paguat), Randangan (pemekaran Marisa), dan Wonosari (pemekaran Paguyaman).

Kemudian bekas kawedanan Boalemo berubah menjadi pembantu Bupati wilayah kerja Paguat yang meliputi lima Kecamatan, yakni : Paguyaman, Tilamuta, Marisa, Popayato. Menengok sejarah Boalemo pada masa lalu, serta mempertimbangkan jarak kendali pemerintahan Kabupaten Gorontalo yang berpusat di Limboto, maka kemudian berkembang Bupati Gorontalo dan DPRD setempat, juga adanya dukungan dari Gubernur dan DPRD Sulawesi Utara sebelum berpisah Gorontalo menjadi Provinsi, kemudian Presiden Republik Indonesia dan DPRD Republik Indonesia menetapkan Undang – undang Nomor 50 tahun 1999, tanggal 4 Oktober 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo.

Kemudian secara resmi Kabupaten Boalemo berdiri setelah diundangkan pada tanggal 12 Oktober 1999. Pada saat saat berdirinya Kabupaten Boalemo meliputi 5 wilayah Kecamatan, yaitu : Kecamatan Paguat, Kecamatan Marisa, Kecamatan Popayato, Kecamatan Paguyaman, Kecamatan Tilamuta.

Melihat perkembangan dan dinamika masyarakat Boalemo yang terjadi, serta Provinsi Gorontalo telah terbentuk maka pada tahun 2003 Boalemo dimekarkan lagi. Pada tanggal 27 Januari 2003 Kabupaten Pohuwato berdiri, wilayah ini tadinya merupakan bagian dari Kabupaten Boalemo yang meliputi Kecamatan Paguat, Kecamatan Marisa, Kecamatan Lemito, dan Kecamatan Popayato. Pembentukan Kabupaten Pohuwato sekaligus mengakhiri polemic ditengah masyarakat Kabupaten Boalemo, sebab didalam pasal 7 Undang – undang Nomor 50 tahun 1999 menyebutkan bahwa Kabupaten Boalemo dalam jangka waktu lima tahun harus memindahkan Ibu Kotanya dari Tilamuta ke Marisa. Setelah itu, beberapa Kecamatan di Kabupaten Boalemo dimekarkan, sehingga lahirlah dua Kecamatan baru, yaitu : Botumoito (pemekaran dari kecamatan Tilamuta), dan Paguyaman Pantai (pemekaran dari Kecamatan Paguyaman).

Boalemo merupakan salah satu daerah secara otonomi memerlukan administrasi dalam membentuk menjadi satu daerah atau satu Kabupaten, karena tanpa administrasi suatu daerah atau Kabupaten tidak akan terbentuk. Pemahaman yang tepat tentang pentingnya peranan administrasi dalam kehidupan modern sangat tergantung pada titik tolak berpikir.

Kemudian pada awal pembentukan Boalemo pada waktu itu tidak memiliki hambatan atau masalah apapun dalam hal administrasi karena pada waktu pembentukan Boalemo menjadi suatu Kabupaten banyak mendapat dukungan dari Bupati Gorontalo, DPRD setempat, dari Gubernur, DPRD Sulawesi Utara, dan juga mendapat dukungan yang sangat besar dari masyarakat Boalemo sehingga Boalemo berdiri sekarang ini karena ada dukungan dari daerah lain dan dukungan dari masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang diformulasikan dengan judul “ *Boalemo Ditinjau Dari Studi Administrasi*”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman tentang administrasi pembangunan?
2. Bagaimanakah tanggapan masyarakat tentang pembentukan Boalemo menjadi satu Kabupaten?

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian adalah : “ Bagaimanakah Sejarah Administrasi di Boalemo ”.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang sejarah administrasi Boalemo.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk pengambilan kebijakan bagi pemerintah untuk menyelesaikan masalah dalam pemerintahan terutama dalam administrasi
- b. Sebagai bahan informasi bagi lembaga pemerintah untuk mengetahui perlunya penataan administrasi bagi pemerintahan
- c. Untuk menambah wawasan berfikir bagi masyarakat dalam mengembangkan dan memanfaatkan pembangunan daerah dengan baik
- d. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian serta pengetahuan khususnya dalam administrasi.